1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Triwulan III tahun 2021 menunjukkan bahwa trend inflasi di Kota Depok fluktuatif, dimana pada bulan Juli Kota Depok mengalami Deflasi sebesar (0,03)%, kemudian pada bulan Agustus Kota Depok mengalami Inflasi sebesar 0,06% dan pada bulan September Kota Depok kembali mengalami Deflasi sebesar (0,07)%. Secara Tahun Kalender Year to Date (Januari s/d September) Tahun 2021 tingkat inflasi Kota Depok mencapai 1,04%, angka ini paling tinggi jika dibandingkan dengan Kota IHK lain di Provinsi Jawa Barat, dimana Tingkat Inflasi Kota Bogor sebesar 1,02%, Kota Sukabumi sebesar 0,76%, Kota Bandung sebesar 0,98%, Kota Cirebon sebesar 0,75%, Kota Bekasi sebesar 0,69% dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,50% serta lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,80%. Namun demikian tingkat inflasi di Kota Depok masih dibawah target inflasi Nasional yang sebesar 3+1%, hal ini tentunya menimbulkan harapan bahwa roda perekonomian di Kota Depok tetap bergerak dan tumbuh dengan positif sehinngga daya beli masyarakat Kota Depok tetap terjaga. Pengendalian inflasi dan Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah menjadi penting, Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi di era pandemi covid-19 ini perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam rangka mempertahankan nilai uang masyarakat yang pada akhirnya akan berperan penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat terutama di masa pandemi ini yang bersyukur Alhamdulillah di akhir triwulan III ini sudah semakin melandai. Untuk Bulan Juli 2021 di Kota Depok terjadi Deflasi sebesar 0,03 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,53. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari beberapa komoditas, Komoditas dengan penurunan harga tertinggi diantaranya adalah Jengkol, Kemeja Panjang Batik Pria, Kemeja Pendek Anak, Anggur, Blus Wanita, Ikan Asin Teri, Daging Ayam Ras, Alpukat, Cabai Merah, Cumi-Cumi Asin, Semangka, Telur Ayam Ras, Sandal Karet Pria, Apel dan Cumi-Cumi Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,14 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,19 persen, Kelompok transportasi sebesar 0,04 persen, dan Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,15 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,23 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,33 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,31 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok Kesehatan, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya, dan Kelompok Pendidikan. Pada Bulan Agustus 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,06 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,59. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari beberapa komoditas, diantaranya yaitu Tomat, Pir, Fitnes Center, Tongkol Diawetkan, Bandeng Diawetkan, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Ikan Dalam Kaleng, Sekolah Dasar, Alpukat, Melon, Bubur Kacang Hijau, Jagung Manis, Upah Baby Sitter, Batu Bata/Batu Tela. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,53 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,04 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,12 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 2,14 persen, dan Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,55 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,13 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu Kelompok transportasi dan Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sementara pada Bulan September 2021 di Kota Depok terjadi deflasi sebesar 0,07

persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,52. . Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari beberapa komoditas. Berikut 15 komoditas dengan penurunan tertinggi, yaitu anggur, jengkol, cabai rawit, telur ayam ras, ketela pohon, telur ayam kampong, sawi putih/pecay/pitsai, bawang bombay, bawang merah, bayam, labu siyam/jipang, kangkung, sosis, bawang putih dan pir. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,14 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,31 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen, Kelompok transportasi sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,45 persen, Kelompok Pakaian dan Alas kaki sebesar 0,04 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,08 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya, Kelompok Pendidikan, dan Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Angka Inflasi di Kota Depok pada Triwulan III Tahun 2021 masih paling tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Nasional, hal ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik Kota Depok yang merupakan daerah konsumen dan bukan daerah produsen yang menurut data Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Depok Tahun 2020 hampir 98% kebutuhannya dipasok dari DKI Jakarta dan daerah lain serta musim penghujan yang mengganggu hasil panen di daerah produsen bahan pangan. Selain itu Inflasi Kota Depok juga didorong oleh beberapa faktor lainnya, antara lain terganggunya kelancaran pasokan karena terganggunya kelancaran distribusi dari daerah produsen akibat banjir seiring curah hujan yang tinggi. Adapun Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih didominasi dari volatile food dan juga beberapa administered prices. Disamping hal tersebut diatas, telah mulai dilakukan pelonggaran pemberlakuan PPKM seiring dengan semakin melandainya masa Pandemi Covid19 di Indonesia yang juga terjadi di Kota Depok, sehingga permintaan berbagai komoditas mulai meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan pasokan yang meningkat pula, sehingga menimbulkan potensi terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas yang terkait dengan berbagai aktifitas masyarakat yang semakin banyak.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Berbagai upaya pengendalian inflasi di Kota Depok pada Triwulan III Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya : Dalam menjaga Keterjangkauan Harga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok rutin melakukan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Rakyat, selain itu juga melalui penyelenggaraan Program Pasar Murah. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian juga rutin menggelar operasi pasar ketika terjadi gejolak harga bahan pangan melalui Toko Tani Indonesia Center atau TTIC. Dalam upaya menjaga Ketersediaan Pasokan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok pada Tahun 2021 ini telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti Pengembangan Urban Farming melalui Lomba Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Dengan konsep “Menanam Cinta di Pekarangan dengan Memanfaatkan Limbah Rumah Tangga” atau disingkat “Naci Pera Falim Ruta”. Kegiatan ini ada di seluruh kelurahan, berupa pemberian bantuan benih, bibit dan sarana prasarana pertanian kepada masyarakat dan Kelompok Tani Binaan. Tantangan ke depan adalah terus memperbanyak sasaran Naci Pera Falim Ruta, bila perlu ada di setiap RW. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan Kota Depok secara rutin melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam upaya menjaga Kelancaran Distribusi, dan untuk mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah membuat Pasar Rakyat Online. Juga Bersama BJB Cabang Depok berkomitmen untuk melakukan digitalisasi retribusi melalui e-retribusi untuk retribusi pelayanan pasar dan retribusi kemetrologian. Disamping itu, pada tahun 2021 ini melalui pendanaan PEN pada provinsi Jawa Barat, akan dibangun pasar rakyat di wilayah barat, yaitu Pasar Sawangan. Adapun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelenggarakan UMKM Depok Virtual Expo dengan harapan akan dapat memperkuat sektor UMKM untuk dapat bertahan dan dapat naik kelas. Dalam upaya menjaga Komunikasi Efektif, Pemerintah Kota Depok senantiasa menyajikan Informasi Data Harga Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat pada Aplikasi Depok Single Window yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Untuk menyusun langkah-langkah kongkret upaya pengendalian inflasi di Kota Depok, akan dilaksanakan Workshop TPID Kota Depok tentang Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi di Kota Depok untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan melibatkan Perangkat Daerah Anggota TPID Kota Depok yang tentunya akan mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional. Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Depok ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota sebagai Dokumen Kebijakan Pengendalian Inflasi yang menjadi salah satu kriteria Penilaian Kinerja TPID Kabupaten Kota. Untuk mendukung Upaya Pengendalian Inflasi di Kota Depok, sesuai arahan Bapak Wali Kota agar dapat segera melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia KPW Jawa Barat untuk pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Depok yang ada di Kecamatan Tapos sebagai bentuk kolaborasi Program Urban Farming dan Petani Milenial dengan menanam komoditas volatile food yang menjadi komoditas penyumbang inflasi di kota Depok seperti Cabai dan Bawang. Melakukan optimalisasi ruang yang belum terpakai di Pasar Cisalak untuk menjadi gudang komoditas dan melakukan kajian untuk menjadi pasar induk tematik komoditas tertentu yang sekaligus dapat menjadi solusi bagi Kota Depok dalam menjaga Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Pasokan komoditas bagi masyarakat Kota Depok. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyerapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional dari Provinsi Jawa Barat yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan Pasar Sawangan di Kota Depok. Secara Tahun Kalender dari Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021, atau angka Inflasi Kota Depok triwulan III, 2021 sebesar 1.04 persen. Sementara angka inflasi DKI Jakarta sebesar 0.59 persen, Jawa Barat 0.87 persen dan nasional 0.8 persen, namun demikian dalam pemenuhan bahan kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami kendala karena ketersediaan pasokan yang mencukupi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi berbagai isu pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2021 adalah: 1. Keterjangkauan Harga : Pelaksanaan pasar murah bersinergi dengan Toko Tani Indonesia Center, Bulog, dan lembaga terkait lainnya Perlunya penguatan koordinasi antara dinas terkait dengan asosiasi dalam rangka monitoring dan evaluasi kelancaran pasokan dan ketersediaannya. 2. Ketersediaan Pangan : Optimalisasi program UMKM naik kelas melalui pemanfaatan digitalisasi sektor pertanian, baik dari Aspek produksi, paska produksi,

distribusi, pemasaran, pembiayaan, dan pembayaran Perlunya penerapan Urban Farming untuk budidaya komoditas pangan strategis di Kota Depok 3. Kelancaran Distribusi : Dukungan BUMD pangan dalam rangka penguatan program Kerja sama Antar Daerah serta peningkatan akses pasar. Pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah khususnya terkait komoditas pangan strategis perlu didukung dengan ketersediaan data neraca pangan. 4. Komunikasi Efektif : Memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan business process dan sustainability program pengendalian inflasi melalui penguatan laporan TPID sehingga dapat mengukur efektivitas program pengendalian inflasi daerah. Penyediaan data dan informasi mengenai harga pangan tingkat eceran maupun produsen melalui aplikasi SILINDA Jawa Barat Peran penting Kepala Daerah dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID, termasuk perumusan kebijakan terkait isu strategis yang dihadapi.